

Development of Community Social Workers

SPEKTRUM

Jurnal Pendidikan Luar Sekolah

<http://ejournal.unp.ac.id/index.php/pnfi>

Jurusan Pendidikan Luar Sekolah

Fakultas Ilmu Pendidikan

Universitas Negeri Padang

Sumatera Barat, Indonesia

Volume 12, Nomor 3, Agustus 2024

DOI: 10.24036/spektrumpls.v12i3.123749

Putri Julita Mina Harafah^{1,4}, Jamaris Jamna², Irmawita³

^{1,2,3}Departemen Pendidikan Luar Sekolah, Universitas Negeri Padang

⁴putrijulitaminaharafah76@gmail.com

ABSTRACT

The basic idea of linking various social welfare development services is to distribute charity equally across the nation in accordance with human rights standards. Based on human rights, quality services have become a necessity. Social services are very important because human rights requirements and good quality services are needs that cannot be denied. Therefore, social services need to be planned systematically and meet the standardization of service quality in line with the philosophy and professional needs of the state. In the future, in the conditions and situations of the development of social problems and community demands, social workers are needed to lead social welfare development programs and policies, based on justice for all and protection of human rights. So, the writing of this article aims to change the way people think and promote the existence of social workers as a profession in the eyes of the public, not only as a non-profit activity, but as a profession with knowledge, skills and values in practice.

Keywords: Profession, Social Worker, Community Development

PENDAHULUAN

Indonesia ialah sebuah negara berkembang yang sedang berada dalam proses pembangunan dalam banyak hal. Tujuan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah bukan hanya untuk pembangunan ekonomi dan keamanan. Perkembangan sosial budaya tidak begitu penting dalam hubungannya dengan pembangunan. Pembangunan sosial budaya ini membutuhkan kerjasama yang saling menguntungkan antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaannya. Dalam proses pengembangannya, menurut Labolo (2008); Rasyid (2000), peran pemerintah terdiri dari 4 bagian, yakni pelayanan (*public service*), pembangunan (*development*), otorisasi (*authorization*) serta pengaturan (*regulation*).

Pemberdayaan mengacu pada kemampuan masyarakat, terutama kelompok lemah dan rentan, yang tidak memiliki akses terhadap kekuasaan atau keterampilan dalam berbagai dimensi kehidupan (Habib, 2021; Hatu, 2010; Patilaiya et al., 2022). Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses pemberdayaan suatu komunitas, memotivasi atau mendorong individu untuk memiliki keberdayaan atau kemampuan untuk mengambil keputusan tentang pilihan hidupnya (Kandati et al., 2019; Ritonga, 2019; Yahya et al., 2021). Selain itu, pemberdayaan harus ditujukan kepada kelompok atau strata masyarakat terbelakang. Dengan diadakannya kegiatan pemberdayaan khususnya bagi kelompok masyarakat rentan/tidak mampu, masyarakat rentan secara tidak langsung mendapatkan keleluasaan untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan kesejahteraan sosial, karena keterlibatan masyarakat dalam aksi pemberdayaan memegang peranan penting dalam kelancaran jalannya kegiatan pembangunan ini. Kelancaran kegiatan pemberdayaan kelompok masyarakat rentan diharapkan dapat mempengaruhi kesejahteraan sosial masyarakat rentan tersebut.

Namun dalam kenyataannya, seringkali terjadi kegiatan pemberdayaan masyarakat belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat atau bahkan tidak selaras. Maka perlu adanya profesi berperan penting untuk hal ini, yang mana dicatat Zastrow, dalam Pengantar pekerjaan sosial dan kepedulian sosial, yang menjelaskan bahwasanya profesi yang paling penting dan memiliki peran paling besar dalam perkembangan kesejahteraan dan perawatan sosial ialah pekerja sosial (Andari,

2020; Husna, 2014). Selain itu, Zastrow (1999) juga berpendapat bahwasanya pekerja sosial sebagai profesi memiliki tugas dan fungsi utama dalam melayani masyarakat untuk mencapai keberfungsian sosial melalui interaksi sosial.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode studi kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan yaitu penelitian dengan teknik pengumpulan datanya diperoleh dari literatur seperti buku, jurnal, laporan penelitian, dan lainnya. Serta dengan jenis analisis deskriptif yang merinci realitas fenomena yang ada. Penulis mengumpulkan referensi terkait topik melalui buku literature, artikel jurnal ilmiah.

PEMBAHASAN

Pekerja Sosial

Zastrow (1999) menjelaskan bahwa pekerja sosial ialah profesi terpenting yang berperan paling besar dalam pengembangan kepedulian sosial. Selain itu, Zastrow juga berpendapat bahwasanya pekerja sosial sebagai profesi memiliki tugas dan fungsi utama dalam melayani masyarakat guna pencapaian fungsi sosial dari interaksi.

Selain itu, definisi lain juga dijelaskan dalam referensi. National Association of Social Work (NASW), mengartikan pekerjaan sosial dengan kegiatan profesional yang melibatkan diri dalam membantu individu, kelompok atau komunitas dalam memulihkan ataupun meningkatkan fungsi sosial mereka serta untuk melahirkan kondisi sosial menguntungkan. Praktek pekerjaan sosial adalah aplikasi profesional dari teknik, prinsip, dan nilai pekerjaan sosial dengan satu atau lebih teknik yang dirancang dalam membantu mendapatkan layanan nyata (misalnya, berhubungan dengan pendapatan perumahan, atau makanan); psikoterapi dan konseling untuk individu, kelompok dan keluarga; untuk membantu kelompok untuk peningkatan maupun menyediakan layanan sosial dan kesehatan; serta partisipasi dalam proses legislatif relevan (NASW, 1973).

Pekerjaan sosial profesional didasari nilai-nilai, pengetahuan serta keterampilan. Pengetahuan tersebut tidak saa berasal pekerja sosial, namun melalui sejumlah disiplin ilmu berfokus perilaku dan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut mencakup sosiologi, ekonomi, psikiatri, antropologi budaya, psikologi, ilmu politik, biologi, dan konseling. Pekerja sosial mengaplikasikan pengetahuan dari bidang apa pun bersama dengan keterampilan dan nilai kerja sosial untuk membantu keluarga, individu, organisasi, kelompok, dan komunitas dalam pemecahan masalah dan peningkatan kualitas hidup mereka. Pekerja sosial berusaha agar peningkatan fungsi sosial individu serta kelompok, dengan kegiatan mereka berfokus pada hubungan mereka, terutama interaksi antara orang dan lingkungan.

Terkait peran, Zastrow dalam Adi (2005) melihat pekerja sosial setidaknya memiliki tujuh peran dan tugas yang dapat dikembangkan oleh pekerja sosial, diantaranya: 1) Akselerator Perubahan (*Enabler*); 2) perantara (*facilitator*); 3) Pendidik (*Educator*); 4) Tenaga ahli (*Expert*); 5) perencana sosial (*social planners*); 6) pengacara (*Advocate*); 7) aktivis (*Activist*). Namun peranan pekerja sosial yang dominan adalah perawat/pekerja sosial yang berperan sebagai edukator dan fasilitator.

Ada banyak cara untuk melirik kemajuan dalam karir sebagai pekerja sosial. Sejumlah pekerja sosial melewati beberapa fase. Gelar pada pekerjaan sosial termasuk sarjana, magister serta doktor. Pekerjaan sosial merupakan kegiatan profesional yang membantu kelompok, individu, bahkan komunitas untuk memulihkan sertameningkatkan fungsi sosial dan melahirkan kondisi sosial bermanfaat dalam hal tersebut. Kesejahteraan sosial merupakan manfaat, layanan, dan sitem program nasional membantu dalam memenuhi kebutuhan sosial, pendidikan, ekonomi, serta kesehatan yang penting dalam mempertahankan masyarakat.

Tujuan Pendidikan, Kurikulum, dan Kompetensi Pekerjaan Sosial

Diantara langkah memahami pekerjaan sosial adalah memantau konten serta ekspektasi pekerjaan sosial terakreditasi. Council for Social Work Education (CSWE) merupakan organisasi akreditasi untuk program kerja sosial di seluruh Amerika Serikat. Akreditasi ialah pernyataan resmi badan berwenang (dalam hal ini CSWE) bahwasanya suatu program terpenuhi standarisasi tertentu. Hal tersebut umumnya dibutuhkan pada lisensi pekerja sosial. Standar Kebijakan dan Akreditasi Pendidikan CSWE (EPAS), menegaskan bahwasanya program kerja sosial perlu mempresentasikan suatu nilai di seluruh kurikulumnya. EPA menjelaskan bahwasanya "Layanan, keadilan sosial, martabat dan nilai pribadi, pentingnya hubungan, integritas, kompetensi, HAM, dan penyelidikan ilmiah adalah nilai inti dari pekerjaan sosial" (CSWE, 2008b). EPA menentukan sepuluh bidang di mana lulusan pekerjaan sosial harus memiliki kualifikasi.

Kompetensi merupakan "perilaku terukur kebiasaan yang terdiri dari pengetahuan yang cukup, keterampilan dan nilai-nilai, dimaksudkan untuk dipraktekkan secara efektif." Sepuluh kompetensi serta area yang teridentifikasi pada kurikulum pekerjaan sosial tradisional. Lima kompetensi pertama, meliputi pengetahuan, keterampilan, nilai mutlak di seluruh kurikulum pekerjaan sosial, yaitu: 1) Kompetensi identifikasi; 2) Kompetensi penerapan sosial; 3) Kompetensi penerapan kritis; 4) Kompetensi Keterlibatan keanekaragaman dalam praktek; 5) kompetensi peningkatan HAM serta keadilan sosial dan ekonomi. Lima kompetensi terakhir terkait bidang konten tradisional atau program studi - penelitian pekerjaan sosial, perilaku manusia dan lingkungan sosial, kebijakan sosial serta praktik pekerjaan sosial, yaitu: 6) Kompetensi keterlibatan dalam penelitian; 7) kompetensi penerapan pengetahuan lingkungan sosial dan perilaku sosial; 8) Kompetensi Keterlibatan pada Praktek Kebijakan meningkatkan kesejahteraan sosial serta memajukan ekonomi; 9) Kompetensi Responsif akan Konteks dari Bentuk Praktik; dan 10) Kompetensi Perjanjian, intervensi, Assessment, dan Evaluasi dengan Individu serta Keluarga.

KESIMPULAN

Pekerjaan sosial yaitu kegiatan profesional dengan melibatkan diri membantu individu, kelompok bahkan komunitas memulihkan atau meningkatkan fungsi sosial serta untuk melahirkan kondisi sosial menguntungkan. Area praktik pekerjaan sosial meliputi anak-anak dan keluarga, orang lanjut usia, orang cacat, kesehatan, kesehatan mental, penggunaan narkoba, kehadiran di sekolah, dan pemeriksaan. Konteks pekerjaan sosial praktis lainnya termasuk pekerjaan sosial pedesaan, pekerjaan sosial polisi serta forensik. Hal ini mencakup beberapa disiplin ilmu, yakni sosiologi, ekonomi, psikiatri, antropologi budaya, psikologi, ilmu politik, biologi, dan konseling. Pekerjaan sosial itu unik sebab mengambil fokus pada masalah tersulit dari diri seseorang, sering membuat target pada lingkungan yang berubah, menegaskan kebutuhan untuk mempengaruhi klien, didasarkan pada profesionalisme inti sebagai nilai, serta penekanan penting kemitraan kerja.

DAFTAR RUJUKAN

- Adi, I. R. (2005). *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. FISIP UI PRESS.
- Andari, S. (2020). Peran Pekerja Sosial dalam Pendampingan Sosial. *Sosio Informa*, 6(02).
- Habib, M. A. F. (2021). Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kreatif. *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, 1(2).
- Hatu, R. A. (2010). Pemberdayaan dan Pendampingan Sosial dalam Masyarakat. *INOVASI*, 7(4).
- Husna, N. (2014). Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. *Jurnal Al-Bayan*, 20(29).
- Kandati, F., Mantiri, M., & Monintja, D. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kecamatan Siau Barat Selatan Kampung Batusenggo (Suatu Studi Pada Dinas Peikanan, Kabupaten Kepulauan Siau Barat Tagulandang). *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 2(2).
- Labolo, M. (2008). *Memahami ilmu pemerintahan*. Raja Grafindo Persada.
- Patilaiya, H. La, Sinurat, J., Sarasati, B., Jumiyati, S., Supriatna, A., Harto, B., Siburian, U. D.,

- Mahaza, M., Maesarini, I. W., & Hapsar, T. D. (2022). *Pemberdayaan Masyarakat*. Global Eksekutif Teknologi.
- Rasyid, R. (2000). *Makna Pemerintahan, Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Mutiara Sumber Widya.
- Ritonga, A. H. (2019). Meneropong Makna, Wacana Dan Pendekatan Dakwah dalam Pembentukan dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Al-Taghyur*, 2(1).
- Yahya, T., Satoto, S., Usman, U., Raharja, I. F., & Windarto, W. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup di Kecamatan Gunung Tujuh Kabupaten Kerinci. *Jurnal Karya Abdi*, 5(3).
- Zastrow, C. H. (1999). *The Practice of Social Work*. Brook/Cole Publishing Company.